LAHIRNJA PKI dan PERKEMBANGANNJA

(II) Habis

oleh: D. N. Aidit

„sekali kali tidak berarti, bahwa kaum Komunis memaksa partai lain atau orang lain supaja mengikutinja, melainkan PKI harus mejakinkan dengan setjara sabar kepada orang2 jang tulus hati, bahwa satu2nja djalan untuk mendapat kemenangan jalah membentuk front nasional jang disokong oleh semua Rakjat jg progresif dan anti-imperialis. Tiap Komunis harus jakin benar2, bahwa dengan tidak adanja front nasional kemenangan tidak akan datang".

Mengenai *perdjuangan bersendjata* dikatakan dalam resolusi „Djalan Baru", bahwa perdjuangan ini harus diutamakan. Perdjuangan bersendjata harus diutamakan karena imperialis Belanda terus-menerus berusaha memperkuat tenaga militernja. Selandjutnja dikatakan bahwa

„Tentara sebagai alat kekuasaan negara jang terpenting harus istimewa mendapat perhatian. Kader2 dan anggota2nja harus diberi pendidikan istimewa jang sesuai dengan kewadjiban tentara sebagai aparat terpenting untuk membela revolusi nasional kita jang berarti pula membela kepentingan Rakjat pekerdja. Tentara harus bersatu dengan dan disukai oleh Rakjat. Tentara harus dipimpin oleh kader2 jang progresif. Dengan sendirinja dan terutama dikalangan kader2nja harus dibersihkan dari anasir2 jang reaksioner dan kontra-revolusioner".

Resolusi tsb. mengkritik kelalaian memberikan djaminan kepada anggota2 ketentaraan dan kepolisian - negara chususnja, dan kepada Rakjat pekerdja umumnja (buruh dan pegawai negeri), sehingga menjebabkan terlantarnja nasib mereka.

Mengenai *Partai* dikatakan bahwa kesalahan pokok dari kaum Komunis jalah telah mengetjilkan rol PKI sebagai satu2nja kekuatan jang seharusnja memegang pimpinan klas buruh dalam mendjalankan revolusi. Berdasarkan kesalahan ini resolusi „Djalan Baru" mengatakan bahwa PKI memutuskan memadjukan usul:

„supaja diantara tiga Partai jg mengakui dasar2 Marxisme-Leninisme (PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia — DNA) jang sekarang telah tergabung dalam Front Demokrasi Rakjat serta telah mendjalankan aksi bersama, berdasarkan program bersama, se-lekas2nja diadakan fusi (peleburan), sehingga mendjadi satu Partai klas buruh dengan memakai nama jang bersedjarah, jaitu Partai Komunis Indonesia ......"

Berhubung dengan [illegible]ngan PKI pada politik reaksioner dari kaum sosialis kanan jang dipelopori oleh Sutan Spahrir, resolusi „Djalan Baru" menjatakan bahwa dengan menjokong politik kaum sosialis kanan itu, PKI sudah membikin dua matjam **kesalahan:**

***Kesalahan pertama,* bahwa PKI tidak memahami adjaran revolusioner, „bahwa revolusi nasional anti imperialis dizaman sekarang ini sudah mendjadi bagian daripada revolusi proletar dunia", bahwa „revolusi nasional di Indonesia harus berhubungan erat dengan tenaga2 anti imperialis lainnja didunia, jaitu perdjuangan revolusioner diseluruh dunia, baik di-negeri2 djadjahan, atau negeri setengah djadjahan, maupun di-negeri2 kapitalis ...."**

Kesalahan kedua, bahwa oleh PKI „tidak tjukup dimengerti perimbangan kekuatan antara Sovjet Uni dan imperialisme Inggeris-USA, setelah Sovjet Uni berhasil dengan sangat tjepatnja menduduki seluruh Mantjuria. Pada waktu itu sudah ternjata kedudukan Sovjet Uni jang sangat kuat dibenua Asia, jang mengikat banjak tenaga militer daripada imperialisme SA, Inggeris dan Australia dan dengan demikian memberi kesempatan baik bagi Rakjat Indonesia untuk memulai revolusinja. Pada saat itu kaum Komunis Indonesia sudah mem-besar2kan kekuatan Belanda dan imperialisme lainnja dan mengetjilkan kekuatan revolusi Indonesia serta golongan anti-imperialis lainnja".

Resolusi menjatakan bahwa PKI mengubah politiknja, jaitu dengan tegas membatalkan persetudjuan Linggardjati dan Renville, jang dalam prakteknja telah mendjadi sumber daripada ber-matjam2 keruwetan diantara pemimpin2 dan Rakjat djelata. Penolakan persetudjuan Linggardjai dan Renville berarti djuga selfkritik jang keras dikalangan PKI.

Disimpulkan dalam Resolusi tsb. bahwa kesalahan2 prinsipiil daripada PKI selama Revolusi Agustus jalah karena lemahnja ideologi Partai. Berhubung dengan ini diputuskan bahwa anggota2 Partai harus mempeladjari teori Marxisme-Leninisme. Tiap2 Komunis diwadjibkan membatja dan mempeladjari teori revolusioner dan diwadjibkan mengadakan kursus2 dikalangan kaum buruh dan kaum tani, agar supaja dan dengan demikian mereka selalu dapat menghubungkan teori dan praktek dengan erat. Teori jang tidak dihubungkan dengan massa tidak dapat merupakan kekuatan, akan tetapi sebaliknja jang berhubungan erat dengan massa merupakan kekuatan jang maha hebat.

Demikianlah, dengan resolusi „Djalan Baru" diletakkan dasar2 untuk pekerdjaan jang lebih baik daripada PKI dilapangan front persatuan, perdjuangan bersendjata dan pembangunan Partai. Resolusi „Djalan Baru" adalah merupakan hukuman jang tidak mengenal ampun terhadap oportunisme didalam dan diluar Partai. **Ia adalah langkah penting untuk menjelamatkan revolusi Indonesia jang sedang dalam bahaja dan langkah penting jang pertama untuk membangun Partai tipe Lenin dan Stalin.**

Politik baru PKI telah memungkinkan timbulnja pasang baru dalam revolusi Indonesia. Rapat2 umum jang diadakan oleh PKI, dimana program baru PKI didjelaskan, mendapat kundjungan puluhan sampai ratusan ribu orang. Massa menjambut adjakan PKI dengan antusias untuk meneruskan peperangan kemerdekaan melawan imperialisme Belanda. Kedok pemerintah reaksioner jang berkuasa ketika itu dan kedok partai Masjumi jang anti-Komunis mulai terbuka dihadapan massa. Massa mulai memahamkan bahwa djalan baru jang ditundjukkan oleh PKI adalah satu2nja djalan untuk memenangkan revolusi.

Takut akan pasang baru dalam revolusi Indonesia, imperialisme Belanda dan Amerika dengan kakitangannja orang2 Indonesia mempergiat usahanja dan menetapkan tindakan2nja untuk menghantjurkan PKI dan gerakan kemerdekaan jang dipimpin oleh PKI.

Achirnja bulan Agustus 1948 timbul provokasi2 di Solo dan kemudian dibeberapa tempat lain. Opsir2 tentara jang revolusioner dibunuh setjara pengetjut. Kantor2 serikatburuh2 dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), diduduki dengan paksa oleh pasukan tentara jang tertentu. Kaum sosialis kanan, kaum trotskis dan partai Masjumi merupakan pembantu2 imperialis jang giat dalam merealisasi politik anti-Komunis.

Dalam pertengahan September 1948 terdjadi insiden di Madiun dikalangan tentara, antara golongan jang menjetudjui politik reaksioner dan provokatif dari pemerintah ketika itu dengan golongan jang tetap setia pada revolusi. Kedjadian ini disebut oleh pemerintah Hata dan dengan mengatakan, bahwa di Madiun terdjadi perebutan kekuasaan oleh kaum Komunis dan kaum Komunis mendirikan negara Sovjet. Dengan alasan dusta ini pemerintah menjerukan kepada semua aparatnja untuk mengedjar, menangkap dan membunuh anggota2 serta pengikut2 PKI. Dengan ini mengamuklah teror putih jang kedua, duplikat daripada teror putih Pemerintah Belanda tahun 1926—1927. Tetapi jang kedua ini lebih kedjam dan lebih ganas dari jang pertama. Djuga anggota2 Masjumi dimobilisasi untuk mengedjar, menangkap dan membunuh Komunis. Dalam keadaan demikian tidak ada djalan lain bagi kaum Komunis ketjuali mengangkat sendjata dan membela diri dengan sekuat tenaga terhadap teror putih jang sedang mengamuk.

Provokasi Madiun adalah satu persiapan untuk perang kolonial Belanda jang baru jang terdjadi dalam bulan Desember 1948, dan semuanja ini merupakan persiapan untuk memaksa Indonesia lebih djauh berkapitulasi kepada imperialisme Belanda. Memang, tidak lama kemudian diadakan gentjatan sendjata dengan Belanda jang diikuti oleh Konferensi Media Bunder dinegeri Belanda.

Selama peperangan melawan Belanda pada achir tahun 1948 sampai permulan tahun 1949 kader2 dan anggoa2 PKI, termasuk mereka jang dikeluarkan atau melarikan diri dari pendjara2 pemerintah Hatta, dengan gagahberani ambil bagian dalam membela Republik Indonesia di-front2 terdepan. Kenjataan ini membuka mata Rakjat akan kepalsuan fitnahan2 kaum reaksioner jang dilemparkan kepada PKI selama „Peristiwa Madiun". Perlawanan PKI jang gigih terhadap tentara Belanda menaikkan prestise politik PKI dimata Rakjat dan ini telah membikin pemerintah tidak mungkin mengeluarkan PKI dari undang2.

Pada tanggal 2 November 1949 ditandatanganilah persetudjuan KMB jang chianat oleh fihak Indonesia dan fihak keradjaan Belanda. Selama perundingan Amerika Serikat menempatkan Marle Cochran di Nederland sebagai tukang bagi instruksi kiri dan kanan.

Keadaan front persatuan sedjak Provokasi Madiun (1948) sampai turunpanggungnja pemerintah Masjumi, Kabinet Sukiman (1951), dalam laporan umum kepada Kongres ke-V PKI dikatakan bahwa:

„burdjuasi nasional memisahkan diri dari front persatuan nasional-anti-imperialisme dan memihak pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir jang memprovokasi „Peristiwa Madiun". Burdjuasi nasional ikut berkapitulasi kepada imperialisme dengan menjetudjui persetudjuan KMB jang chianat .... Politik burdjuasi nasional jang memisahkan diri dari front persatuan nasional terasa sangat berat bagi Partai, karena partai, berhubung kelemahan pekerdjaannja dikalangan kaum tani, belum dapat bersandar kepada kaum tani. Keadaan ini memaksa Partai mendjalankan taktik untuk mendapatkan waktu guna menarik kembali burdjuasi nasional kedalam front persatuan nasional anti-imperialisme dan untuk memperbaiki serta memperkuat pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani. Kebenaran taktik Partai ini dibuktikan oleh perkembangan politik dalamnegeri jang baru jang dimulai dalam tahun 1952".

Kesimpulan daripada semuanja jalah:

Revolusi Agustus (1945-1948) telah mengalami kekalahan karena PKI dalam menghadapi revolusi ini masih belum menjimpulkan pengalaman2nja dalam soal front persatuan dan tidak berpengalaman dalam soal perdjuangan bersendjata dan dalam soal pembangunan Partai.

Tetapi walaupun revolusi ini kalah, ia telah membikin PKI berpengalaman dalam front persatuan. Revolusi ini sendjata sangat berpengaruh telah memberikan pengalaman jang penting pada PKI tentang sifat bimbang daripada burdjuasi nasional, bahwa dalam keadaan jang tertentu bisa ikut dan bersikap teguh berfihak pada revolusi, tetapi dalam keadaan lain ia bisa gontjang dan mengchianat. Oleh karena itu proletariat dan PKI harus senantiasa tidak henti2nja menarik burdjuasi kedalam revolusi, tetapi djuga harus berdjaga2 akan kemungkinan mereka mengchianati revolusi. Sifat dualisme dari burdjuasi nasional Indonesia sangat mempengaruhi garis politik dan pembangunan Partai. Madju mundurnja Partai dan madju mundurnja revolusi banjak tergantung pada hubungan Partai dengan burdjuasi nasional. Demikianlah pula sebaliknja.

Dalam berserikat dengan burdjuasi nasional Partai tidak boleh meninggalkan kebebasannja dan tidak boleh melengahkan sekutu jang paling bisa dipertjaja, jang paling banjak djumlahnja, jaitu kaum tani.

Revolusi ini djuga telah membikin PKI mendjadi berpengalaman mengenai soal pembangunan Partai, telah membikin kader2 PKI lebih mengerti tentang keadaan masjarakat Indonesia, tentang tanda2 istimewa dan hukum2 revolusi Indonesia, telah memungkinkan kader2 PKI mempeladjari teori Marxisme-Leninisme dan beladjar memperpadukan teori Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia.

Djuga satu pengalaman, bahwa dalam revolusi, perdjuangan bersendjata adalah bentuk perdjuangan jang terpenting. Perkembangan Partai, disamping sangat tergantung pada front persatuan, djuga sangat tergantung pada perdjuangan bersendjata. Madju mundurnja perdjuangan bersendjata sangat berpengaruh pada madju-mundurnja front persatuan dan Partai. Walaupun tidak setjara lengkap, tentang pengalaman2 selama revolusi telah disimpulkan dalam resolusi „Djalan Baru". Resolusi „Djalan Baru" merupakan langkah pertama jang penting dalam mentjiptakan satu Partai Komunis jang dibolsjewikkan, jang meluas keseluruh negeri, jang berhubungan erat dengan massa dan jang diperkokoh dalam ideologi, politik dan organisasi.

„Peristiwa Madiun" telah membikin kader2 dan anggota2 PKI mendjadi lebih waspada dan lebih militant.

Perluasan front persatuan nasional dan pembangunan partal (1951-. . . .)

Periode ini dimulai dengan sidang *Pleno Central Comite* dalam bulan April 1951 jang berhasil merentjanakan Konstitusi PKI. Rentjana Konstitusi ini setelah disampaikan kepada organisasi2 bawahan telah menimbulkan diskusi jang luas didalam Partai. Dengan tidak menunggu pensahannja oleh Kongres, seluruh Partai serempak bersedia menggunakan rentjana Konstitusi ini sebagai pegangan dalam aktivitet pembangunan Partai se-hari2, dan pengalaman2 praktis jang didapat dari pelaksanaan Konstitusi ini akan didjadikan bahan2 untuk membikin amandemen2.

Diskusi dan pelaksanaan Konstitusi PKI sangat mendorong perkembangan Partai, meninggikan tingkat politik anggota2 Partai, menghidupkan demokrasi intern Partai, menghidupkan kritik dan selfkritik didalam Partai, memperkuat disiplin, ideologi dan kesatuan tenaga Partai. Partai mulai mengerti dan mulai melaksanakan dua tugasnja jang pokok, jaitu: tugas penggalangan front persatuan dan tugas pembangunan Partai. Semuanja ini terdjadi dibawah kekuasaan pemerintah reaksioner, pemerintah Sukiman (Masjumi).

Karena sedar akan bahaja jang mengantjam dari gerakan Rakjat revolusioner dan dari PKI jang sedang tumbuh, karena melihat bahwa „Provokasi Madiun" ternjata tidak „mematikan" gerakan revolusioner dan PKI, kaum imperialis asing dan kaum reaksioner dalamnegeri mendjadi matagelap dan membikin komplotan lagi untuk menghantjurkan PKI. Sekarang tidak dengan provokasi di Solo atau di Madiun, tetapi dengan satu „serangan" terhadap pos polisi di Tandjung Priok, jang oleh pemerintah Sukiman diproklamasikan sebagai „serangan Komunis". Kira2 2000 orang Komunis dan orang2 progresif lainnja ditangkap dan dimasukkan kedalam pendjara. Tetapi atas desakan Rakjat, sesudah berbulan2 meringkuk didalam pendjara, semua dikeluarkan dengan tak seorangpun bisa dihadapkan kemuka pengadilan. Gagalnja Sukiman (Masjumi) dengan Razzia Agustusnja adalah menundjukkan bahwa gerakan revolusioner di Indonesia sudah bangun kembali dan mempunjai kekuatan.

Masih didalam suasana Razzia Agustus, pada permulaan tahun 1952, PKI mengadakan *Konferensi Nasional* jang membitjarakan setjara mendalam politik terhadap pemerintah Sukiman. Konferensi memutuskan bahwa pemerintah Sukiman harus didjatuhkan dengan membentuk front anti pemerintah Sukiman jang luas, dengan berusaha menarik burdjuasi nasional. Mengenai gerombolan DI-TII jang pada waktu itu melakukan teror besar2an di Djawa Barat dan Djawa Tengah, Konferensi berpendapat bahwa gerombolan2 ini adalah alat kaum imperialis dan kaum [illegible] dalamnegeri untu[illegible]pit gerakan Rakj[illegible]sioner diantara kek[illegible] reaksioner jang ada di-kota2 dengan jang ada di-desa2, agar dengan demikian kaum reaksioner dapat menghantjurkan gerakan revolusioner dan dapat berkuasa penuh atas seluruh negeri. Konferensi memutuskan, supaja segenap kekuatan Partai dikerahkan, dan ber-sama2 dengan aparat2 negara dan partai2 serta organisasi2 demokratis lainnja menghantjurkan gerombolan2 teroris DI-TII. Selain daripada itu Konferensi mengambil putusan2 penting untuk memperkuat ideologi dan organisasi Partai. Untuk memungkinkan pelaksanaan tugas Partai jang berat dan pelik ketika itu, Konferensi memutuskan untuk meluaskan keanggotaan Partai.

Dengan desakan jang terus-menerus dari gerakan Rakjat jang demokratis, dengan makin tjondongnja burdjuasi nasional kekiri, dan sebagai hasil daripada pertentangan2 dikalangan golongan2 jang berkuasa didalamnegeri, pemerintah Sukiman terpaksa turun panggung dan pada tanggal 1 April 1952 berdirilah pemerintah Wilopo (PNI) jang segi2 politiknja jang madju disokong oleh PKI. Dalam pemerintah Wilopo ini duduk djuga menteri2 dari Masjumi dan PSI. Karena tindakan2 menteri2 dari Masjumi dan PSI jang anti-Rakjat, seluruh kekuatan demokratis, termasuk PNI sendiri, mendjatuhkan kabinet Wilopo. Atas desakan jang lebih kuat dari Rakjat, pada tanggal 30 Djuli 1953 berdirilah pemerintah Ali Sastroamidjojo (PNI) tanpa Masjumi-PSI. PKI menjokong segi2 jang madju dari politik pemerintah Ali Sastroamidjojo.

Terbentuknja pemerintah jang politiknja mempunjai segi2 madju dan jang disokong oleh klas buruh dan Rakjat banjak, membuktikan adanja gelombang naik daripada gerakan revolusioner di Indonesia. Ini menundjukkan makin bersatunja kekuatan2 nasional, termasuk burdjuasi nasional, dalam menghadapi kekuatan2 reaksioner dari luar dan dalamnegeri. Dalam keadaan demikian, sampai batas2 jang tertentu gerakan revolusioner dan PKI dapat berkembang.

Dalam gelombang naik daripada gerakan revolusioner ini, dalam bulan Oktober 1953 diadakan rapat *Pleno Central Comite PKI,* sebagai persiapan untuk Kongres Nasional ke-V PKI. Dalam sidang Pleno ini dimasukkan amandemen2 untuk perbaikan rentjana Konstitusi, dibikin rentjana Program PKI, laporan umum kepada Kongres dan putusan terhadap Tan Ling Djie-isme, jaitu aliran oportunis didalam Partai jang mau mengembalikan garis politik dan organisasi Partai kepada keadaan sebelum ada resolusi „Djalan Baru". Sidang Pleno Central Comite ini telah merumuskan usul2 kepada Kongres untuk memetjahkan semua masaalah penting dan pokok daripada revolusi Indonesia.

Dalam bulan Maret 1954 dilangsungkan *Kongres Nasional Ke-V PKI* jang bersedjarah dengan tudjuan untuk mendjawab semua masaalah penting dan pokok daripada revolusi Indonesia, untuk pekerdjaan jang lebih baik daripada Partai dalam menggalang front persatuan, untuk mendjawab semua masaalah pokok pembangunan Partai dan untuk mengeratkan hubungan PKI dengan massa. Dalam Kongres ini disahkan semua dokumen jang dirantjangkan oleh Sidang Pleno Central Comite bulan Oktober 1953. Disamping itu disahkan pula Manifes Pemilihan Umum PKI dan diputuskan untuk memperluas keanggotaan dan organisasi Partai.

Setelah menganalise keadaan masjarakat Indonesia, dalam Program PKI ditetapkan bahwa Indonesia sekarang adalah negeri setengah-djadjahan dan setengah feodal. Berhubung dengan itu dikatakan:

„Selama keadaan di Indonesia masih tetap tidak berubah, artinja, selama kekuasaan imperialisme belum digulingkan dan sisa-sisa feodalisme belum dihapuskan, Rakjat Indonesia takkan mungkin membebaskan diri dari keadaan melarat, terbelakang, pintjang dan tak berdaja dalam menghadapi imperialisme. Kekuasaan imperialisme dan sisa2 feodalisme tidak akan hapus di Indonesia selama kekuasaan negara dinegeri kita dipegang oleh tuantanah dan komprador jang berhubungan erat dengan kapital asing karena mereka mau mempertahankan penindasan imperialis dan sisa2 feodal dinegeri kita, karena mereka paling takut kepada Rakjat Indonesia.

„Djika Indonesia mau madju dari suatu negeri setengah-djadjahan dan setengah feodal mendjadi negeri merdeka, demokratis, makmur dan madju, maka adalah soal jang pokok, diatas se-gala2nja, untuk mengganti pemerintah tuan2 feodal dan komprador dan mentjiptakan pemerintah Rakjat, pemerintah Demokrasi Rakjat.

Mengenai pemerintah Rakjat dikatakan dalam Program PKI, bahwa pemerintah ini:

„akan merupakan pemerintah front persatuan nasional, jang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani dibawah pimpinan klas buruh. Mengingat terbelakangnja ekonomi negeri kita, PKI berpendapat bahwa pemerintah ini harus tidak merupakan pemerintah diktatur proletariat melainkan pemerintah diktatur Rakjat. Pemerintah ini bukannja harus melaksanakan perubahan2 sosialis melainkan perubahan2 demokratis. Ia akan merupakan suatu pemerintah jang mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti-imperialis, jang mampu mendjamin hak2 demokrasi bagi Rakjat: suatu pemerintah jang mampu membela industri dan perdagangan nasional terhadap persaingan asing, jang mampu meninggikan tingkat hidup materiil kaum buruh dan menghapuskan pengangguran. Dengan singkat, ia akan merupakan suatu pemerintah Rakjat jang mampu mendjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannja melalui djalan demokrasi dan kemadjuan".

Tetapi bagaimana djalannja untuk keluar dari keadaan setengah djadjahan dan setengah feodal dan untuk membentuk pemerintah Rakjat? Program PKI mendjawab:

„Djalan keluar terletak dalam mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu fihak, dan kekuatan Rakjat difihak jang lain. Djalan keluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani".

Tentang rol kaum buruh dalam mengubah imbangan kekuatan ini dikatakan:

„Klas buruh harus memelopori perdjuangan seluruh Rakjat. Untuk tudjuan ini klas buruh sendiri harus meningkatkan aktivitetnja, mendidik dirinja sendiri dan mendjadi kekuatan jang besar dan sedar. Klas buruh tidak hanja harus melakukan perdjuangan untuk memperbaiki tingkat hidupnja, ia djuga harus meningkatkan tugas2nja ketingkat jang lebih luas dan lebih tinggi. Ia harus membantu perdjuangan klas2 lainnja. Klas buruh harus membantu perdjuangan kaum tani untuk tanah, perdjuangan kaum inteligensia untuk hak2nja jang pokok, perdjuangan burdjuasi nasional melawan persaingan asing, perdjuangan seluruh Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan2 demokratis. Rakjat bisa mentjapai kemenangan hanja apabila klas buruh Indonesia sudah merupakan kekuatan jang bebas, sedar, matang dalam politik, terorganisasi dan mampu memimpin perdjuangan seluruh Rakjat, hanja apabila Rakjat sudah melihat klas buruh sebagai pemimpinnja".

Berdasarkan analise daripada klas2 didalam masjarakat Indonesia, Program PKI membikin djelas kawan dan lawan jang sungguh2 didalam revolusi. Berdasarkan analise ini djuga Kongres Nasional ke-V PKI memutuskan meletakkan kewadjiban penting diatas pundak PKI, jatu kewadjiban membentuk front persatuan daripada semua kekuatan nasional daripada revolusi, jaitu kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional. Front persatuan ini harus terbentuk berdasarkan persekutuan buruh dan tani, seluas2nja dan hasil perdjuangan revolusioner daripada massa. Inilah sjarat bagi Rakjat Indonesia untuk mendirikan suatu pemerintah Rakjat, untuk mengalahkan lawan2 revolusi, jaitu kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador.

Untuk menggalang front persatuan nasional jang sungguh, kewadjiban PKI jang per-tama2 jalah menarik kaum tani kedalam front persatuan nasional. Tentang ini dikatakan dalam laporan umum kepada Kongres Nasional ke-V:

„..... agar kaum tani dapat ditarik, kewadjiban jang terdekat daripada kaum Komunis Indonesia jalah melenjapkan sisa2 feodalisme .... Langkah pertama dalam pekerdjaan dikalangan kaum tani jalah membantu perdjuangan mereka untuk kebutuhan se-hari2, untuk mendapatkan tuntutan-bagian kaum tani. Dengan demikian berarti mengorganisasi dan mendidik kaum tani kearah tingkat perdjuangan jang lebih tinggi. Inilah dasar untuk membentuk persekutuan kaum buruh dan kaum tani sebagai basis daripada front persatuan nasional jang kuasa".

Mengenai perdjuangan parlementer dan sokongan PKI pada pemerintah Wilopo dan kemudian pemerintah Ali Sastroamidjojo Program PKI menjatakan:

„PKI memandang pekerdjaan dalam parlemen bukan sebagai pekerdjaan Partai jang pokok dan tidak memandang perdjuangan parlementer sebagai satu2nja bentuk perdjuangan".

Tetapi ini tidak berarti bahwa PKI mengabaikan pemilihan umum dan perdjuangan parlementer, dan bahwa PKI mengambil sikap jang satu dan sama terhadap pemerintah2 jang ada sampai sekarang dan terhadap pemerintah2 jang akan ada dikemudian hari sampai terbentuknja pemerintah Demokrasi Rakjat.

„PKI", kata program tsb., „mendasarkan politiknja atas analise Marxis mengenai keadaan jang kongkrit dan perimbangan kekuatan. PKI telah ambil bagian dan terus akan ambil bagian jang paling aktif dalam perdjuangan parlementer. PKI, sedar sepenuhnja akan tanggungdjawab politiknja, mendjalankan pekerdjaan parlementer dengan penuh ke-sungguh2an. PKI bukannja tidak mem-beda2kan sikap terhadap tiap2 pemerintah jang lampau. Dalam keadaan2 jang tertentu Partai beroposisi terhadap pemerintah dan berseru kepada massa untuk menggulingkannja, dalam keadaan2 lain Partai menjokong pemerintah dan dalam keadaan2 jang lain lagi turut dalam pemerintah".

Perdjuangan parlementer dan sokongan PKI kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo djuga harus ditudjukan untuk memperluas dan memperkuat front persatuan nasional.

Sebagaimana dikatakan dalam laporan umum kepada Kongres Nasional ke-V, kewadjiban menggalang front persatuan adalah kewadjiban urgen jang pertama dari PKI.

Kewadjiban urgen jang kedua daripada PKI jalah meneruskan pembangunan PKI jang meluas keseluruh negeri, jang mempunjai karakter massa jang luas dan jang sepenuhnja dikonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Mengenai ini Kongres mengingatkan akan perkataan kawan Stalin, bahwa kalau kita mau menang dalam revolusi kita harus mempunjai Partai revolusioner tipe Lenin, atau sebagai jang dikatakan oleh Mao Tje-tung, Partai tipe Lenin-Stalin.

Partai demikian tidak mungkin dibentuk djika PKI tidak menguasai teori Marxisme-Leninisme. Peranan pelopor daripada Partai hanja mungkin djika Partai dipimpin oleh teori jang madju. Hanja Partai jang menguasai teori Marxisme-Leninisme jg bisa memelopori dan memimpin klas buruh dan massa Rakjat banjak lainnja.

Kongres djuga berpendapat bahwa PKI hanja bisa memenuhi kewadjiban sedjarahnja jang besar dan berat djika Partai terus-menerus melakukan perdjuangan jang tidak kenal ampun terhadap kaum oportunis kanan maupun „kiri" didalam barisannja sendiri. Berdasarkan ini Kongres membenarkan dan memperkuat putusan sidang Central Comite bulan Oktober 1953 mengenai Tan Ling Djie-isme. Kongres membikin resolusi chusus mengenai Tan Ling Djie-isme dan menjimpulkan, bahwa „Tan Ling Djie-isme sebenarnja sudah berkuasa didalam PKI selama revolusi tahun 1945-1948 sampai pada permulaan tahun 1951". Kongres menetapkan bahwa:

„Tan Ling Djie-isme dilapangan ideologi adalah subjektivisme, adalah aliran dogma'is dan empirisis didalam Partai, jang telah menjebabkan Partai membikin kesalahan2 kanan dan „kiri" jang sangat merusak pertumbuhan Partai dan pertumbuhan gerakan revolusioner".

Kongres memperingatkan bahwa Partai tidak boleh sombong djika mentjapai kemenangan2, Partai harus senantiasa melihat kekurangan-kekurangan didalam pekerdjaannja, Partai harus berani mengakui kesalahan2nja dan dengan terang2an dan djudjur memperbaiki kesalahan2nja. Partai akan mendjadi tak terkalahkan djika Partai tidak takut pada kritik dan selfkritik, djika Partai tidak menjembunjikan kesalahan2 dan kekurangan2 dalam pekerdjaannja, djika Partai mengadjar dan mendidik kader2nja menarik peladjaran dari kesalahan2 pekerdjaan Partai dan pandai memperbaikinja tepat pada waktunja.

Karena Indonesia adalah negenri burdjuis ketjil, artinja negeri, dimana perusahaan2 pemilik2 ketjil masih sangat banjak terdapat, maka ideologi burdjuasi ketjil, jaitu subjektivisme, mempunjai basis sosial jang kuat. Makaitu Kongres menetapkan bahwa bagi Partai adalah sangat penting melawan subjektivisme didalam Partai. Kedua matjam subjektivisme, jaitu dogmatisme dan empirisisme, adalah sama2 berbahaja didalam Partai, bisa menjebabkan Partai mendjalankan oportunisme kanan dan „kiri". Subjektivisme hanja bisa dilawan djika Partai mengadjar anggota2nja memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalise situasi politik dan dalam menghitung kekuatan klas. dan djika Partai memimpin perhatian anggota2 kearah penjelidikan dan studi dilapangan sosial dan ekonomi.

Untuk mempersatukan massa pekerdja jang luas disekeliling Partai, Partai harus mengarahkan perhatian anggota2nja kepada pekerdjaan2 praktis jang ketjil2, jang remeh2 jang ada hubungannja dengan kebutuhan se-hari2 dari kaum buruh, kaum tani dan kaum intelektuil pekerdja. Pekerdjaan ini bukanlah pekerdjaan jang menjenangkan atau enak dan sonder kesukaran2. Tetapi hanja inilah djalan untuk mengeratkan hubungan Partai dengan massa dan untuk tidak lagi mendjadikan Partai mangsa daripada sembojan2 kekiri-kirian.

Demikian pokok2 jang diputuskan untuk membangun Partai. Dengan ini kewadjiban kedua jang urgen daripada PKI mendjadi djelas. Dengan ini berarti PKI beladjar dari pengalamannja sendiri untuk membangun dan mendjadikan dirinja Partai tipe Lenin-Stalin.

Mengenai front persatuan dan pekerdjaan PKI untuk front persatuan sedjak tahun 1951 oleh Kongres disimpulkan sbb.:

„......... persatuan dengan burdjuasi nasional makin bertambah erat, tetapi persekutuan kaum buruh dan kaum tani masih belum kuat. Dengan perkataan lain, Partai masih tetap belum mempunjai fondamen jang kuat. Dalam tingkat ini Partai dengan keras harus melawan penjelewengan kekanan jang memberi arti jang berlebih-lebihan kepada persatuan dengan burdjuasi nasional dengan mengetjilkan arti pimpinan klas buruh dan arti persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Bahaja ini jalah bahaja melepaskan sifat bebas daripada Partai, bahaja meleburkan diri dengan burdjuasi. Disamping itu, sudah tentu Partai djuga harus dengan keras mentjegah penjelewengan kekiri, mentjegah sektarisme, jaitu sikap jang tidak mementingkan politik front persatuan dengan burdjuasi nasional dan memelihara front persatuan dengan sekuat tenaga. Karena klik burdjuasi komprador bersandar pada imperialisme jang berlainan, dan karena politik Partai sekarang ini pertama-tama ditudjukan kepada imperialisme Belanda dan bukan kepada semua imperialisme asing, maka telah timbul pertentangan jang bertambah tadjam dikalangan kaum imperialis sendiri dan pertentangan2 ini dengan sendirinja djuga timbul dikalangan komprador2nja. Terbentuknja front persatuan dengan burdjuasi nasional ini membukakan kemungkinan2 baru bagi perkembangan dan pembangunan Partai dan bagi pekerdjaan Partai jang terdekat, jaitu menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodalisme. Pembangunan Partai dan penggalangan persekutuan kaum buruh dan kaum tani adalah djaminan bagi pimpinan proletariat atas front persatuan nasional".

Kongres Nasional ke-V PKI, beladjar dari sedjarah PKI jang pandjang, dan berpedoman pada Marxisme-Leninisme, telah melikwidasi periode sebelum tahun 1951 didalam PKI. Dengan berhasilnja Kongres ini setjara definitif zaman lama jang gelap daripada Partai sudah ditutup untuk se-lama2nja, dan periode baru berkembang dengan suburnja, periode jang dimulai dalam tahun 1951.

Dalam bulan November 1954, dengan dilangsungkannja sidang *Pleno Central Comite ke-2,* periode baru ini dikembangkan dengan putusan untuk lebih memperluas front persatuan. Berdasarkan analisa keadaan politik di Indonesia, sidang Central Comite ini menetapkan bahwa PKI sudah mendjadi kekuatan nasional jang penting dan besar, jang tidak mungkin diabaikan oleh kawan maupun lawan. Berdasarkan analisa sedjarah dan keadaan kepartaian di Indonesia Central Comite memutuskan supaja PKI aktif mengusahakan adanja kerdjasama antara PKI dengan partai2 lain, terutama dengan partai2 Nasionalis dan partai2 jang berdasarkan Islam. Tentang ini dikatakan dalam putusan tsb. a.l.:

„Kerdjasama antara Partai dan massa Komunis dengan partai dan massa Nasionalis dan Islam bagi kita bukan hanja sesuatu jang dapat dibatasi sampai selesainja pemilihan umum jang akan datang, sebagaimana sering dikatakan oleh pemimpin2 Nasionalis dan Islam. Kita menghendaki kerdjasama djuga sampai sesudah pemilihan umum, dengan tidak perduli siapa jang akan menang nanti. Dan apa jang kita inginkan ini adalah sesuai dengan sembojan Republik kita „Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda tetapi satu)"

Putusan penting jang lain dari Central Comite jalah tentang tjara pimpinan kolektif.

„sebagai sjarat jang tidak boleh tidak untuk mengkonsolidasi Partai dilapangan ideologi dan organisasi, untuk membikin Partai lebih militant dan untuk mempererat hubungan Partai dengan massa. Dengan Partai jang demikian, persatuan jang lebih luas daripada semua kekuatan nasional pasti akan mendjadi kenjataan".

Dari seluruh uraian diatas djelaslah, bahwa selama 35 tahun proses pembangunan dan pembolsjewikan Partai adalah sangat erat hubungannja dengan garis politik Partai, dengan tepat atau tidak tepatnja Partai meme-

(Bersambung ke hal IV kol. 9)

PENGUMUMAN.

Karena sempitnja ruangan rubrik „HR-Muda" terpaksa diundur.

Red.

BEDANJA. . . .

Robert Payne dalam bukunja „Mao Tse Tung the ruler of red China" menjamakan Mao Tse Tung dengan Sjahrir sebagai tokoh Asia.

Salah Robby, tidak sama. Sama2 orang Asia sih, sama. Tetapi isinja lain. Mao memimpin perlawanan dan membebaskan rakjat Tiongkok dan Sjahrir tjukup dengan „Renungan Indonesia"-nja sadja, tidak usah diperdjuangkan direnungkan sadja tjukup.